

**PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN
GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI

Oleh
LINARTI RAMLI
NIM 105710228915



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

**PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN
GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

LINARTI RAMLI
NIM 105710228915

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini kupersembahkan untuk :

1. Bapak Ramli dan Ibu Nurlia yang telah membesarkan dengan penuh cinta kasih dan ketulusan semua yang kau berikan padaku dan kebaikanmu tidak dapat diukur oleh apapun juga serta lantunan doa dan motivasi kalian yang tak pernah henti tucurahkan untukku
2. Kedua adekku, sebagai ungkapan rasa sayang yang selalu mendoakanku
3. Muh. Yusuf yang telah menemaniku meneliti dan selalu memberikanku semangat
4. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2015
Terimakasih atas doa dan motivasi yang telah diberikan keluarga besar dan orang-orang terdekat, berkat kalian semua skripsi ini dapat terselesaikan.

MOTTO HIDUP

"Apapun yang kamu kerjakan tekunlah dan bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan walaupun itu sulit bagimu kerjakanlah pada akhirnya kamu akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan"

"Kebahagiaan akan terasa lebih manis, lewat sebuah perjuangan yang sepenuh hati"

Wassalam

Linarti Ramli



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl.Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Gowa Provinsi
Sulawesi Selatan".

Nama Mahasiswa : Linarti Ramli
No.Stambuk/NIM : 105710228915
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
PerguruanTinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji
Skripsi Strata Satu (S1) Pada Hari Sabtu 31 Agustus 2019.

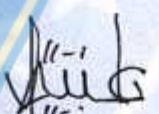
Makassar, 20 Juni 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,


Dr. Hj. Arniati, SE., M.Pd
NIDN: 0907037104

Pembimbing II,


Nasrullah, SE., MM
NIDN: 0914049104

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903 078

Ketua Prodi,


Hj. NAIDAH, SE., M.Si
NMB. 710 561



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl.Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Linarti Ramli, NIM : 105710228915, diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0005/SK-Y/60201/091004/2019 M, tanggal 31 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Dzulhijjah 1440 H
31 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MMN (.....) (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr HR. Agus Salim, HR, SE., MM (.....) (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji
1. Dr. H. Muhmmad Rusydi, M. Si (.....)
2. Dr. H. Muh.Ikram Idrus, M. Si (.....)
3. Asriati, SE.,M. Si (.....)
4. Dr. Hj. Arniati, SE.,M.Pd (.....)



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Ismail Rasulong, SE.,MM
NIM. 903 078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl.Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linarti Ramli

Stambuk : 105710228915

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Dengan Judul : Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Gowa Provinsi
Sulawesi Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2019
Yang Membuat Pernyataan,



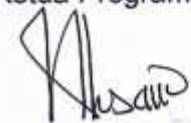

Linarti Ramli

Diketahui Oleh:



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM. 903 078

Ketua Program Studi,


Hj. NAIDAH, SE., M.Si
NMB. 710 561

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis skripsi yang berjudul "Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua ortua penulis bapak Ramli dan ibu Nurlia yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta (Sry Nabila Ramli dan Sry Nirmawati Ramli) yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE.,MM., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Hj. Naidah, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Arniati, SE.,M.Si selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Nasrullah, SE.,MM selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak Asdar Saputra SE.,MM selaku Sekretaris Jurusan Studi Ekonomi Pembangunan dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 20 Juni 2019


Linarti Ramli

ABSTRAK

Linarti Ramli, Tahun 2019 “Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan” Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Dibimbing oleh Ibu Hj. Arniati Selaku Pembimbing I dan Bapak Nasrullah Selaku Pembimbing II.

Penerimaan dan Pengeluaran daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2013-2017 cenderung mengalami peningkatan sedangkan pertumbuhannya mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerimaan dan pengeluaran daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPKD dan BPS Kabupaten Gowa data yang digunakan adalah data time series 2013-2017. Data dianalisis menggunakan regresi berganda yang diolah dalam program SPSS 22. Berdasarkan hasil analisis penerimaan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa selama periode 2013 sampai 2017 menunjukkan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu t-hitung 4,944 > t-tabel 4,302 dengan nilai probabilitas 0,039 dibawah 0,05 atau 5% artinya variabel penerimaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis pengeluaran daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa selama periode 2013 sampai 2017 menunjukkan nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel yaitu t-hitung 1,375 < t-tabel 4,302 dengan nilai probabilitas 0,303 di atas 0,05 atau 5% artinya variabel pengeluaran daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa.

Kata Kunci : Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT

Linarti Ramli, Year 2019 "The Influence of Regional Expenditure Budget on Economic Growth in Gowa Regency, South Sulawesi Province" Scenario of the Development Economics Study Program of the Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar Guided by Ms. Hj. Arniati As Advisor I and Mr Nasrullah as Advisor II.

Regional Revenues and Expenditures in Gowa Regency 2013-2017 tended to increase while economic growth declined. This study aims to determine whether regional revenues and expenditures influence economic growth. This study uses a quantitative method using secondary data obtained from BPKD and BPS Gowa Regency the data used in the 2013-2017 time series data. Data is analyzed using multiple regression processed in the SPSS 22 program. Based on the result of the analysis of regional revenue on economic growth in Gowa Regency during the period 2013 to 2017 shows the value of t-count is greater than t-table namely t-count $4,944 > t\text{-table } 4,302$ with the probability value $0,039$ is below $0,05$ or 5% , which means that the regional revenue variable has a positive and significant effect on economic growth. Based on the analysis of regional expenditures on economic growth in Gowa Regency during the period 2013 to 2017, the t-count value is smaller than t-table, namely t-count $1.375 < t\text{-table } 4.302$ with a probability value of $0,303$ above 0.005 or 5% means Regional expenditure variables have a positive and not significant effect on economic growth in Gowa Regency.

Keywords: Regional Revenue, Regional Expenditures, economic Growth.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. APBD	6
1. Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	6
2. Fungsi APBD	6
3. Struktur APBD	7
4. Proses Penyusunan APBD	12

5. Proses Penetapan dan Perubahan APBD	13
B. Pertumbuhan Ekonomi	14
1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	14
2. Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi	15
3. Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	18
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	19
C. Tinjauan Empiris.....	21
D. Kerangka Pemikiran	24
E. Hipotesis Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C. Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran	26
D. Populasi dan Sampel.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum.....	34
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)	45
C. Hasil Pengolahan Data.....	62
D. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)	69
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

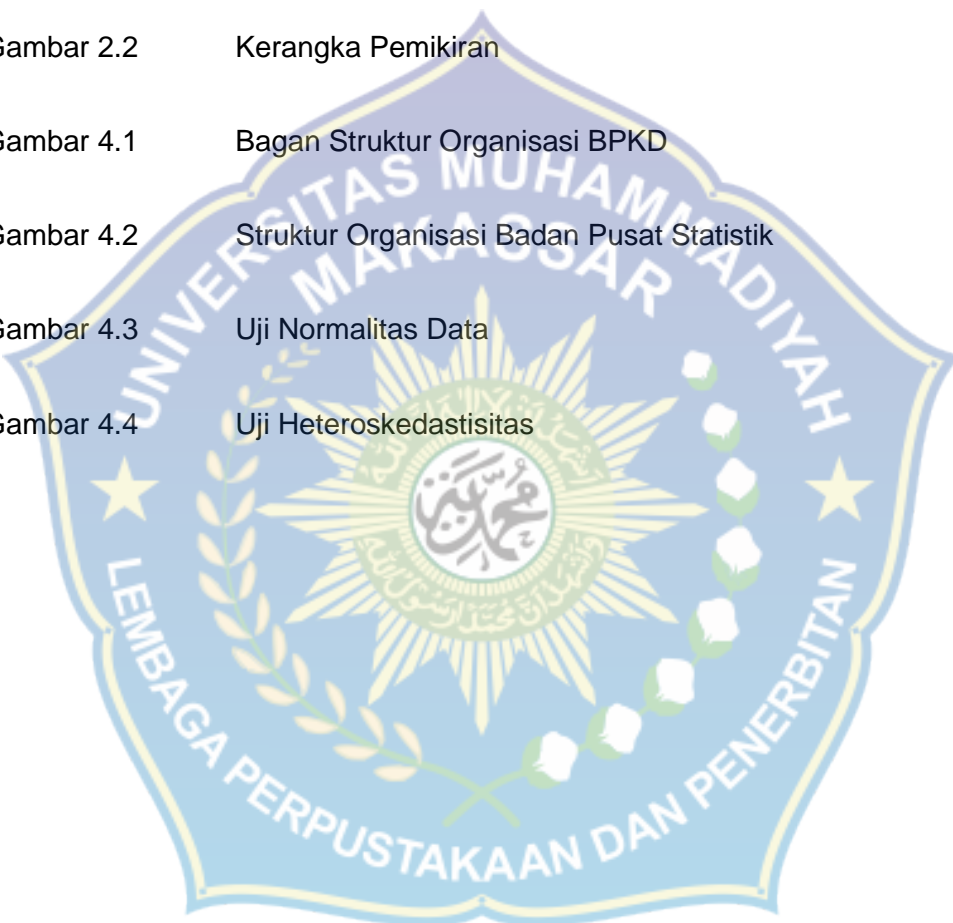
Nomor	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan, Pengeluaran Dan Pertumbuhan Kabupaten Gowa 2013-2017	3
Tabel 2.1	Tinjauan Empiris	21
Tabel 3.1	Kriteria Hubungan Antara Variabel (R Square)	30
Tabel 4.1	Realisasi Penerimaan Daerah Kab. Gowa Tahun 2013	45
Tabel 4.2	Realisasi Penerimaan Daerah Kab. Gowa Tahun 2014	47
Tabel 4.3	Realisasi Penerimaan Daerah Kab. Gowa Tahun 2015	48
Tabel 4.4	Realisasi Penerimaan Daerah Kab. Gowa Tahun 2016	50
Tabel 4.5	Realisasi Penerimaan Daerah Kab. Gowa Tahun 2017	51
Tabel 4.6	Realisasi Pengeluaran Daerah Kab. Gowa Tahun 2013	53
Tabel 4.7	Realisasi Pengeluaran Daerah Kab. Gowa Tahun 2014	54
Tabel 4.8	Realisasi Pengeluaran Daerah Kab. Gowa Tahun 2015	55
Tabel 4.9	Realisasi Pengeluaran Daerah Kab. Gowa Tahun 2016	56
Tabel 4.10	Realisasi Pengeluaran Daerah Kab. Gowa Tahun 2017	57
Tabel 4.11	PDRB Kab.Gowa Atas Dasar Harga Konstan tahun 2013-2017	59
Tabel 4.12	Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2013-2017 menurut lapangan usaha (Persen)	60

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 4.13	Analisi Regresi Berganda	62
Tabel 4.14	Output Koefisien Determinasi	64
Tabel 4.15	Hasil Uji Simultan (Uji F)	65



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Struktur APBD	11
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran	24
Gambar 4.1	Bagan Struktur Organisasi BPKD	39
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik	43
Gambar 4.3	Uji Normalitas Data	67
Gambar 4.4	Uji Heteroskedastisitas	68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Hasil Pengolahan Data.....	77
2. Dokumentasi Penelitian.....	86
3. Surat Keterangan Meneliti	87
4. Daftar Riwayat Hidup (Biografi Penulis)	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak berlakunya otonomi daerah di Indonesia pengelolaan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang mengatur otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan yang lebih luas dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional.

Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kedua Undang-Undang ini mengatur tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, perlu dibarengi dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tanpa adanya otonomi keuangan daerah tidak akan pernah ada otonomi bagi pemerintah daerah. Jadi kedua Undang-Undang tersebut saling melengkapi.

Pemberian otonomi daerah ini sangatlah berpengaruh bagi pertumbuhan daerah dan salah satu alasan dibentuknya otonomi daerah adalah daerah dapat memaksimalkan potensi daerahnya sehingga pembangunan di pusat dapat berjalan seimbang dengan pembangunan di daerah.

APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang di gali dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah atau sumber daya alam dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor lain yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam perencanaan anggaran dan belanja daerah, setiap daerah mempunyai prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Anggaran berimbang yang dimaksudkan adalah adanya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran sedangkan dinamis diartikan bahwa semakin meningkatnya anggaran dan tabungan pemerintah daerah, sehingga semakin berkurang ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dan propinsi, terutama dalam melaksanakan otonomi daerah.

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten yang ada di propinsi Sulawesi selatan yang struktur ekonomi kabupaten gowa sebagian besar berada pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian kabupaten gowa sebesar 30 persen pada tahun 2017 (Indikator Ekonomi Kabupaten Gowa, 2017). Meskipun kontribusi lapangan usaha ini cukup besar, tetapi dari tahun ketahun kontribusinya terus

menurun. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi di kabupaten gowa. Pergeseran struktur ekonomi kabupaten gowa dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan, Pengeluaran Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	Penerimaan Daerah	Pengeluaran Daerah	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2013	1.085.461.894	1.057,021,023	9,42
2014	1.240,560,247	1.295,875,178	7,17
2015	1.448,483,269	1.334,729,333	6,79
2016	1.610,421,215	1.602,546,758	7,61
2017	1.790,263,499	1.727,962,526	7,23

Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa 2017 dan BPS kabupaten Gowa dalam angka 2018

Berdasarkan data yang ada dalam Tabel 1.1 Dari tahun 2013 sampai tahun 2017, baik realisasi penerimaan maupun pengeluaran pemerintah daerah selalu bergerak dinamis dan cenderung meningkat. Pada tahun 2013, penerimaan daerah sebesar 1,08 triliun rupiah untuk pengeluaran daerah sebesar 1,05 triliun rupiah tahun 2014 penerimaan daerah sebesar 1,24 triliun rupiah untuk pengeluaran daerah 1,29 triliun rupiah tahun 2015 penerimaan daerah sebesar 1,44 triliun rupiah untuk pengeluaran daerah sebesar 1,33 triliun rupiah tahun 2016 penerimaan daerah sebesar 1,61 triliun rupiah untuk pengeluaran daerah sebesar 1,60 triliun rupiah dan pada tahun 2017 penerimaan daerah sebesar 1,79 triliun rupiah untuk pengeluaran 1,72 trilin rupiah. Pada Pertumbuhan ekonomi tahun 2013

meningkat sebesar 9,42 persen tetapi pada tahun 2014 dan 2015 pertumbuhan ekonomi turun menjadi 7,17 persen dan 6,79 persen. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi kembali menguat menjadi sebesar 7,61 persen. Namun pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi menurun kembali menjadi 7,23 persen.

Mengenai data tersebut memunculkan permasalahan yang menarik untuk dikaji mengenai pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan sedangkan penerimaan dan pengeluaran daerah cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu penelitian mengenai hal tersebut penting untuk dilakukan, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul: “Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa ?
2. Apakah pengeluaran daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa.

2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dibidang ekonomi, khususnya ekonomi makro terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan informasi tambahan untuk mengambil kebijakan pada masa yang akan datang.

3. Bagi Akademisi

Untuk menambah koleksi karya ilmiah sebagai sumber atau acuan bagi yang ingin memperkaya wawasan mengenai masalah yang akan dibahas pada laporan penelitian ini serta sebagai khasanah perbendaharaan Ekonomi Pembangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD (Ahmad Yani, 2013 : 61)

APBD pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 januari sampai tanggal 31 desember (Ahmad Yani, 2013 : 62)

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Fungsi APBD

Peraturan menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

2. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah.
5. Fungsi distribusi yaitu makna bahwa anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

3. Struktur APBD

a. Anggaran pendapatan atau penerimaan daerah

Anggaran pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- a. Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak Negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan kendaraan bermotor, dan lain-lain.
- b. Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan kepada pemda secara langsung dan nyata kepada pembayar. retribusi daerah antara lain adalah pelayanan kesehatan, pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi daerah, ijin trayek dan lain-lain.
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah, yang terdiri dari bagian laba perusahaan daerah air minum, bagian lembaga keuangan non bank,

bagian laba perusahaan milik daerah lainnya dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

2. Dana Perimbangan

Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun pos-pos dana perimbangan tersebut terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil (DBH) dana yang bersumber dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak perseorangan (PPH), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam seperti: kehutanan, perikanan, pertanian, minyak dan gas.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 21).
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang di sediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 1. Kebutuhan tidak dapat di perhitungkan dengan rumus dana alokasi umum.
 2. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.

3. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah di gariskan.

3. Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari bantuan dana kontijensi/ penyesuaian dari pemerintah dan dana darurat yang merupakan APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan atau krisis *solvability*.

b. Belanja atau Pengeluaran Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :

1. Belanja langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jenis belanja langsung dapat berupa belanja pegawai/personalia, belanja barang/jasa dan belanja modal.
2. Belanja tidak langsung yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jenis belanja tidak langsung dapat berupa belanja pegawai/personalia,

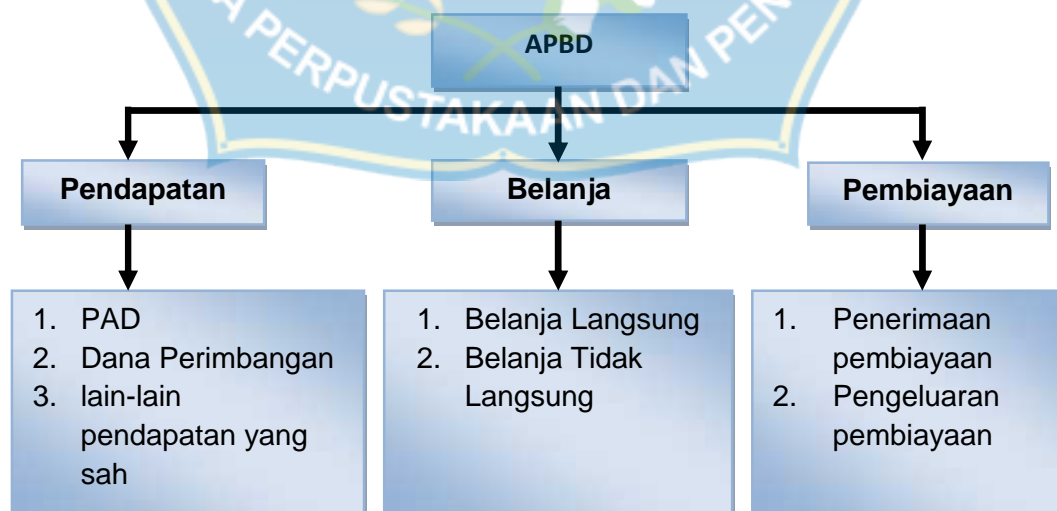
belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman.
2. Pengeluaran Pembiayaan antara lain seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman.



Gambar 2.1 : Struktur APBD

4. Prose penyusunan APBD

APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja yang merupakan indikator dan atau sasaran kinerja pemerintah daerah yang menjadi acuan laporan pertanggungjawaban tentang kinerja daerah. APBD memuat:

- a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.
- b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan. Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan secara berkesinambungan.
- c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja pembangunan.

Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya. Standar analisa belanja adalah penilai kewajaran atau beban kinerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Tolak ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi perangkat daerah dan standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing Daerah.

Proses penyusunan APBD dimulai dengan menyiapkan rancangan APBD. Untuk itu pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD. Selanjutnya berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD tersebut. Pemerintah daerah menyusun strategi dan prioritas APBD. Jika strategi dan prioritas APBD telah disusun dan

dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, pemerintah daerah menyiapkan rancangan APBD.

5. Proses Penetapan dan Perubahan APBD

Untuk penetapan APBD kepala daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. rancangan APBD yang disampaikan kepala daerah tersebut dapat disetujui atau tidak disetujui DPRD. Jika rancangan APBD tidak disetujui DPRD, maka pemerintah daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut. Selanjutnya penyempurnaan rancangan APBD tersebut diatas harus disampaikan kembali kepada DPRD. Jika rancangan APBD yang sudah disempurnakan tersebut tidak disetujui DPRD, Pemerintah daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan daerah.

Dalam perjalanannya APBD yang telah disetujui DPRD tersebut di atas dapat mengalami perubahan. Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir, jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.

Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan:

- a. Kebijakan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah yang bersifat strategis.
- b. Penyesuain akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan.
- c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan mendesak ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana

sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka.

B. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat. Perjalanan dari waktu ke waktu, diharapkan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan dambaan semua negara.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan pertumbuhan perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Menurut Sadono Sukirno (2013 : 9) Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Secara konvensional pertumbuhan ekonomi suatu negara diukur sebagai peningkatan presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB), begitu juga untuk tingkat regional (daerah) dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya penambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai, maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman, yang akan berpengaruh pada tingkat produktifitasnya yang semakin meningkat. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

2. Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi

Terdapat beberapa teori yang mengungkapkan pertumbuhan ekonomi, antara lain:

a. Teori Klasik Adam Smith

Tokoh klasik ini dipelopori oleh Adam Smith yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: luas tanah, jumlah penduduk, jumlah barang, modal dan teknologi yang di gunakan.

Teori klasik juga mengemukakan keterkaitan antara jumlah pendapatan perkapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut disebut teori optimum. Teori ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketika produksi marginal lebih tinggi dari pada pendapatan perkapita, jumlah penduduk masih sedikit dan tenaga kerja masih

kurang. Maka pertumbuhan penduduk akan menambah tenaga kerja, dan menaikkan pertumbuhan ekonomi.

2. Ketika produk marginal makin menurun, pendapatan nasional semakin naik tetapi dengan kecepatan yang lambat. Maka pertumbuhan penduduk akan menambah tenaga kerja, tetapi pendapatan perkapita menurun namun pertumbuhan ekonomi masih ada meskipun kualitasnya semakin kecil.
3. Ketika produksi marginal lainnya sama dengan pendapatan perkapita, artinya nilai pendapatan perkapita mencapai maksimum dan jumlah penduduk optimal (jumlah penduduk yang sesuai dengan keadaan suatu negara yang ditandai dengan pendapatan perkapita mencapai maksimum). Sehingga penambahan penduduk akan membawa pengaruh yang tidak baik terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut kaum klasik bahwa hukum *The Law of Diminishing Returns* menyebabkan tidak semua penduduk dapat dilibatkan dalam proses produksi. Jika hal ini dipaksakan justru akan menurunkan output nasional. Pertambahan tenaga kerja yang diikuti pertambahan produk terjadi apabila pertambahan tenaga kerja diikuti dengan pertambahan modal.

b. Teori Neo Klasik Sollow

Teori ini yang dikembangkan oleh Abramovits dan Sollow melihat dari sudut pandang penawaran. Pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi tergantung pertumbuhan modal, penduduk dan teknologi. Sollow

mengemukakan bahwa faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah penambahan modal dan penambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan pertumbuhan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja (Sadono Sukirno, 2013 : 437).

Jika teori Sollow diterapkan di Indonesia, maka teori menyatakan bahwa pertumbuhan tenaga kerja bukanlah yang terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi tetapi kemahiran dan kepakaran tenaga kerja ini yang dapat disebut sebagai kualitas SDM. Agar pertumbuhan ekonomi terwujud pemerintah harus lebih giat dalam meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki.

c. Teori Keynesian

Teori ini di pelopori oleh John Maynard Keynes yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek output nasional dan kesempatan kerja terutama ditentukan oleh permintaan agregat. Kaum Keynesian yakin bahwa kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal harus digunakan untuk mengatasi pengangguran dan menurunkan laju inflasi. Konsep-konsep Keynesian juga menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat berperan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian pasar sepertinya sulit untuk menjamin ketersediaan barang yang dibutuhkan masyarakat, dan bahkan sering menimbulkan instability, inequity, dan inefisiensi. Bila perekonomian sering dihadapkan pada ketidakstabilan, ketidakmerataan, dan ketidak efesiansian jelas akan menghambat terjadinya pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

d. Teori Harrod-Domar

Teori ini mengemukakan bahwa investasi berpengaruh terhadap permintaan agregat yaitu melalui penciptaan pendapatan dan terhadap penawaran agregat melalui peningkatan kapasitas produksi. Selama investasi netto tetap berlangsung pendapatan nyata dan output terus meningkat.

Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah berperan sebagai salah satu investasi yang diberikan oleh pemerintah dalam mendorong pendapatan nasional.

3. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Perkembangan teori ekonomi pertumbuhan dan meningkatnya ketersediaan data daerah mendorong meningkatnya perhatian terhadap ketidak merataan pertumbuhan daerah. Teori ekonomi pertumbuhan dimulai oleh Robert Solow yang dikenal dengan model pertumbuhan neoklasik. Dan beberapa ahli ekonomi Amerika mulai menggunakan data-data daerah.

Untuk melihat ketidak merataan pertumbuhan ekonomi regional dapat ditentukan dengan beberapa cara. Secara umum dalam menghitung pertumbuhan dengan:

- a. Pertumbuhan output
- b. Pertumbuhan output per pekerja
- c. Pertumbuhan output perkapita

Pertumbuhan output digunakan untuk mengetahui indikator kapasitas produksi. Pertumbuhan output per pekerja seringkali digunakan untuk mengetahui indikator dari perubahan tingkat kompetitifitas daerah,

sedangkan pertumbuhan output perkapita digunakan sebagai indikator perubahan dari kesejahteraan.

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi regional harus dibandingkan dengan tingkat pendapatan regional dari tahun ke tahun atau dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$g_t = \frac{\Delta P}{P} = \frac{P_{t-P} - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

Dimana :

g_t = Pertumbuhan Ekonomi

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

Δ = Perubahan

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno (2013: 429-432), Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi antara lain sebagai berikut:

a. Tanah dan kekayaan alam lainnya.

Kekayaan alam suatu Negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang ada. kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan.

Pertumbuhan ekonomi disetiap negara yang baru bermula terdapat banyak hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi diluar sektor utama (pertanian dan pertambangan). Peranan penanaman barang pertanian untuk ekspor dan pertambangan minyak

menjadi penggerak permulaan bagi pertumbuhan ekonomi di beberapa negara asia adalah bukti nyata besarnya perann kekayaan alam pada tingkat permulaan pertumbuhan ekonomi.

b. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja.

Barang-barang modal dan tingkat teknologi penting dalam mempertinggi koefisien pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi menimbulkan beberapa efek positif dalam pertumbuhan ekonomi dan oleh karena itu pertumbuhan ekonomi semakin pesat dengan adanya kemajuan teknologi akan mempertinggi koefisien kegiatan produksi, menimbulkan barang-barang baru dan meningkatkan mutu barang yang diproduksi tanpa meningkatkan harganya.

c. Sistem sosial dan sikap masyarakat.

Dalam negara berkembang, sistem sosial dan sikap masyarakat menjadi penghalang pertumbuhan ekonomi. Adat istiadat menjadi penghambat masyarakat untuk mengguakan cara memproduksi yang modern dan produktivitas tinggi. Sikap masyarakat juga menentukan sampai mana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Sikap masyarakat yang member dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain sikap berhemat untuk berinvestasi, sikap menghargai kerja keras, dan kegiatan lain untuk megembangkan usaha.

C. Tinjauan Empiris

Penelitian mengenai Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Tinjauan Empiris

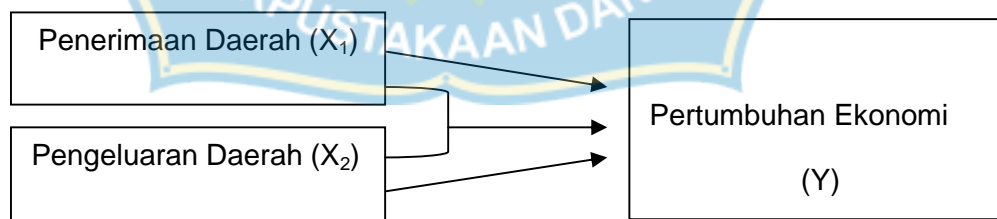
No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	I Gusti Ayu Putri Wahyuni (2014)	Pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan kab/kota di provinsi bali	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi dari tahun 2000-2012 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kab/kota di provinsi bali dan pengeluaran pemerintah investasi dan pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan kab/kota di provinsi bali.

2	Daud wido (2017)	Analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten /provinsi di provinsi lampung tahun 2011-2015	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi lampung
3	Reza monanda berutu (2013)	Pengaruh APBD terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dairi	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran rutin memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dari tingkat kepercayaan 95%
4	Dy Ilham Satria munandar (2017)	Model pemanfaatan pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus dalam APBD kab/kota di provinsi aceh	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAK berpengaruh secara simultan terhadap perubahan anggaran belanja modal kab/kota di

				aceh dan pemanfaatan DAK untuk belanja modal kab/kota di aceh lebih besar dibandingkan dengan PAD.
5	Andri Devita (2014)	Pengaruh PAD, DAU dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah kab/kota di provinsi jambi	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh Positif dan signifikan mempengaruhi belanja langsung sedangkan koefisien jumlah penduduk memiliki hubungan yang negatif terhadap belanja langsung pada pemerintah kab/kota di provinsi jambi dengan tingkat kepercayaan 5 %

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pembangunan berbagai konsep dan teori yang digunakan dengan penelitian ini. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi obyek permasalahan dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka. Dari penelitian Daud Wido (2017) dengan judul “analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/provinsi di provinsi lampung tahun 2011-2015” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi lampung dan penelitian Reza monanda berutu (2013) dengan judul “pengaruh APBD terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dairi” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran rutin berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dari tingkat kepercayaan 95%. Sehingga dilakukan penelitian kembali dan membentuk kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2 : Kerangka Pemikiran

E. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan dasar teori yang mendasarinya maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga bahwa penerimaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa.
2. Diduga bahwa pengeluaran daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya pada data berupa angka-angka yang diolah dengan metode statistika. Pada dasarnya pendekatan kuantitatif dilakukan dalam rangka pengujian hipotesis.

B. Lokasi dan waktu Penelitian

Tempat dilaksanakannya penelitian ini pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) di Kabupaten Gowa yang berlokasi di jalan Mesjid Raya No. 30 Sungguminasa, Somba Opu, Sulawesi Selatan 92114 dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa yang berlokasi di jalan Mesjid Raya No. 36 Sungguminasa, Somba Opu, Sulawesi Selatan 92111.

Waktu penelitian direncanakan dalam kurung waktu kurang lebih 2 (dua) bulan terhitung mulai pelaksanaannya setelah Seminar Proposal. Mei-Juni 2019.

C. Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:61) dalam penenelitian ini digunakan dua macam variabel yaitu:

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan ini. digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Variabel Dependen (terikat)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y). Pertumbuhan Ekonomi merupakan peningkatan ekonomi yang dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

2. Variabel Independen (bebas)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Daerah (X_1)

Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Penerimaan Daerah bersumber dari PAD, Dana Perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah.

2. Pengeluaran Daerah (X_2)

Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi yang peneliti pilih sebagai obyek penelitian di Kabupaten Gowa mengenai Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2. Sampel yang digunakan pada penelitian ini realisasi Penerimaan, Pengeluaran dan Pertumbuhan Ekonomi dalam kurun waktu Tahun 2013-2017.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder yang dimaksudkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan bahan dokumen

Pengumpulan bahan dokumen yang dimaksudkan disini adalah peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi memanfaatkan data yang telah dirampung sebelumnya oleh pihak pengelola atau dinas yang bersangkutan. Pada umumnya, data sekunder yang digunakan oleh pihak peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap ataupun untuk diproses lebih lanjut. Dalam metode pengumpulan data sekunder, obsevator tidak meneliti langsung, tetapi data didapatkan misalnya dari media massa, BPS, lembaga pemerintah maupun swasta, lembaga penelitian maupun pusat bank, data hasil penelitian lain, penelitian kepustakaan dalam hal untuk mengetahui berbagai pengetahuan dan karya yang pernah dicapai oleh para peneliti terdahulu. Dengan penelitian kepustakaan, akan melatih peneliti untuk membaca kritis segala bahan yang dijumpainya, kecamatan dan ketelitian peneliti akan sangat teruji dalam memutuskan sumber yang dipercayannya.

F. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan teknik metode analisis regresi berganda atas tiga variabel dan bertujuan untuk memudahkan penelitian dalam menginterpretasikan data yang akan diolah sehingga memudahkan untuk memahami kaitan antara variabel secara parsial ataupun simultan. Sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 22.

1. Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda yaitu hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel bebas atau independen ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$) dengan variabel terikat atau dependen (Y). Uji analisis ini digunakan untuk menganalisa hubungan antara variabel-variabel bebas dalam hal ini penerimaan daerah (X_1) dan pengeluaran daerah (X_2) dengan variabel terikatnya dalam hal ini pertumbuhan ekonomi (Y). Semua variabel tersebut dapat dirangkum dalam suatu hubungan fungsional.

Adapun model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pertumbuhan Ekonomi yang diproxy dengan PDRB
harga konstan

X_1 = Penerimaan Daerah

X_2 = Pengeluaran Daerah

= Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien Regresi

= Error Team

2. Koefisien Korelasi

Digunakan untuk melihat besarnya kontribusi variabel bebas (X) terhadap terikat (Y). Untuk mengetahui kekuatan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Kriteria Hubungan Antara Variabel (Koefisien Determinasi)

No	Nilai R Square	Keterangan
1	0	Tidak Ada Kolerasi
2	>0-0,25	Korelasi Sangat Lemah
3	>0,25-0,50	Korelasi Cukup
4	>0,50-0,75	Korelasi Kuat
5	>0,75-0,99	Korelasi Sangat Kuat
6	1	Korelasi Sempurna

3. Koefisien Determinan (R Square/R²)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dalam bentuk persentase.

4. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen, apakah variabel tingkat Penerimaan Daerah (X1) dan Pengeluaran Daerah (X2) benar-benar berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen Y (Pertumbuhan Ekonomi). Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Untuk mengetahui nilai F hitung dapat digunakan dengan rumus :

Mencari nilai F-hitung dengan formulasi persamaan dan nilai F kritis dari tabel distribusi F. nilai F kritis berdasarkan besarnya k dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator ($k-1$) dan df untuk denominator ($n-k$). adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji simultan (uji F) yaitu:

- a. Jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- b. Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi (negatif/positif) variabel dependen secara signifikan.

5. Uji Parsial (Uji t)

Uji-t digunakan untuk menunjukkan apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil dari t hitung dan t tabel atau dapat juga dilakukan dengan membandingkan probabilitasnya pada derajat keyakinan tertentu.

Jika nilai $sig < 0,05$, atau t hitung $>$ nilai t tabel maka H_0 di tolak atau menerima H_a artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Sedangkan, jika nilai $sig > 0,05$, atau t hitung $<$ nilai t tabel maka H_0 ditolak artinya variabel individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.

Bila dengan membandingkan probabilitasnya pada derajat keyakinannya 5% maka bila probabilitas $< 0,05$ berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Sebaliknya, bila probabilitas lebih dari 0,05 maka variabel independen

tidak berpengaruh secara signifikan. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang digunakan melalui uji hipotesis satu sisi

- a. Jika hipotesis positif

$$H_0 : \rho \geq 0$$

$$H_a : \rho < 0$$

- b. Jika hipotesis negatif

$$H_0 : \rho \leq 0$$

$$H_a : \rho > 0$$

Jika $T_{tabel} > t_{hitung}$ maka H_0 diterima berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen sebaliknya, Jika $t_{tabel} < t_{hitung}$ maka H_0 ditolak berarti variabel independen secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

6. Uji normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik, artinya sebelum melakukan analisis yang sesungguhnya, data penelitian tersebut harus di uji kenormalan distribusinya. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan memiliki distribusi yang normal atau tidak. Adapun dasar pengambilan keputusan memenuhi normalitas atau tidak, adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- b. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

7. Uji Heteroskedastisitas.

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan kepengamatan yang lain. Dasar pengambilan keputusan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian tidak terdeteksi heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa data yang memenuhi persyaratan tersebut memenuhi syarat asumsi klasik tentang heteroskedastisitas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Gowa

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa adalah merupakan satuan kerja perangkat Daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Gowa Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan badan yang memegang peranan dan fungsi strategis dibidang perencanaan, pencairan, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi secara Efektif dan Efesien telah ditetapkan aturan bagi para pemegang Jabatan Struktural maupun Non Struktural sebagai Perangkat Daerah dan Unsur pelaksana Otonomi Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dalam Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah.

a. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Visi

Berdasarkan keadaan saat ini dan perkiraan strategis 5 tahun yang akan datang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa telah menetapkan visi yang telah dirumuskan dan menjadi komitmen bersama dengan melibatkan seluruh stakeholders dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Adapun visi yang ditetapkan yaitu sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Handal dan Akuntabel guna mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan harapan yang terkandung dalam visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu dirumuskan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan proyeksi kondisi tentang masa depan. Selaras dengan visi yang telah dirumuskan bersama, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa merumuskan dan menetapkan misi untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kualitas layanan kesekretariatan;
- b. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
- c. Meningkatkan sistem administrasi pengelolaan Barang Milik daerah.

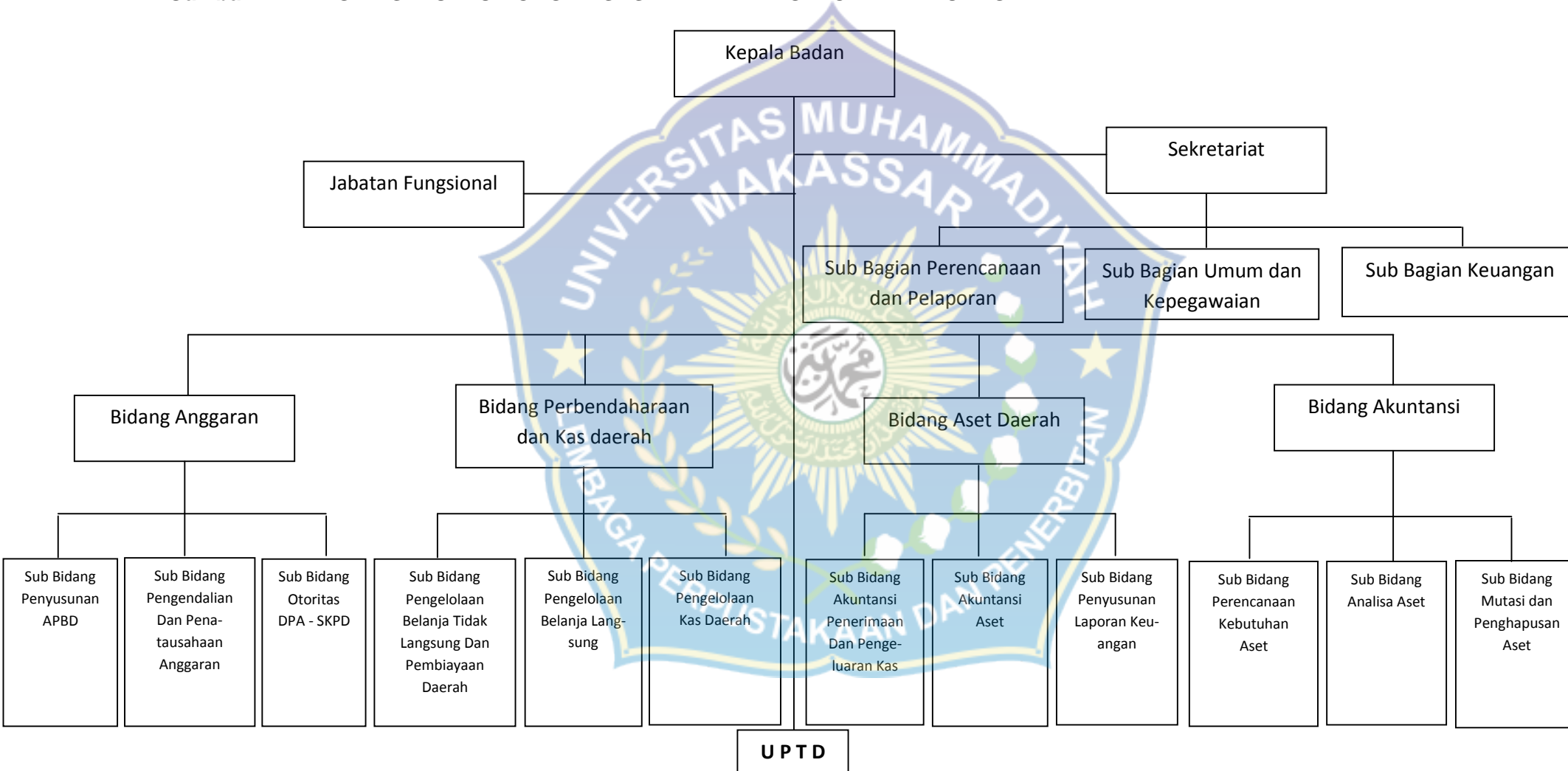
b. Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
2. Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Badan terdiri dari :
 - a) Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.
 - b) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian
 - c) Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.
3. Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan penyusunan APBD terdiri dari :

- a) Sub. Bidang Penyusunan APBD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melakukan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b) Sub. Bidang Pengendalian Dan Penatausahaan Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melakukan pengendalian dan penatausahaan anggaran.
 - c) Sub. Bidang Otoritas DPA – SKPD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melakukan otorisasi DPA-SKPD
4. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan perbendaharaan dan kas daerah terdiri dari :
- a) Sub. Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung Dan Pembiayaan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan pengelolaan belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah.
 - b) Sub. Bidang Pengelolaan Belanja Langsung mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan pengelolaan belanja langsung.
 - c) Sub. Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Kas Daerah.

5. Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - a) Sub. Bidang Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran kas.
 - b) Sub. Bidang Akuntansi Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melakukan pelaporan akuntansi aset.
 - c) Sub. Bidang Penyusunan Laporan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melakukan penyusunan laporan keuangan daerah.
6. Bidang Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan pelaporan aset daerah.
 - a) Sub. Bidang Perencanaan Kebutuhan Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam perencanaan kebutuhan aset.
 - b) Sub. Bidang Analisa Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam melakukan analisa aset
 - c) Sub. Bidang Mutasi dan Penghapusan Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam melakukan mutasi dan penghapusan aset..
7. Jabatan Fungsional Melakukan kegiatan sesuai dengan] fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 4.1 : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Gowa 2019

2. Badan Pusat Statistik Kab. Gowa

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindak lanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain: Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.

Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.

Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS. Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut:

Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder. Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

a. Tugas

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

1. Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik;
2. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
3. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
4. Penetapan sistem statistik nasional;
5. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; dan

6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

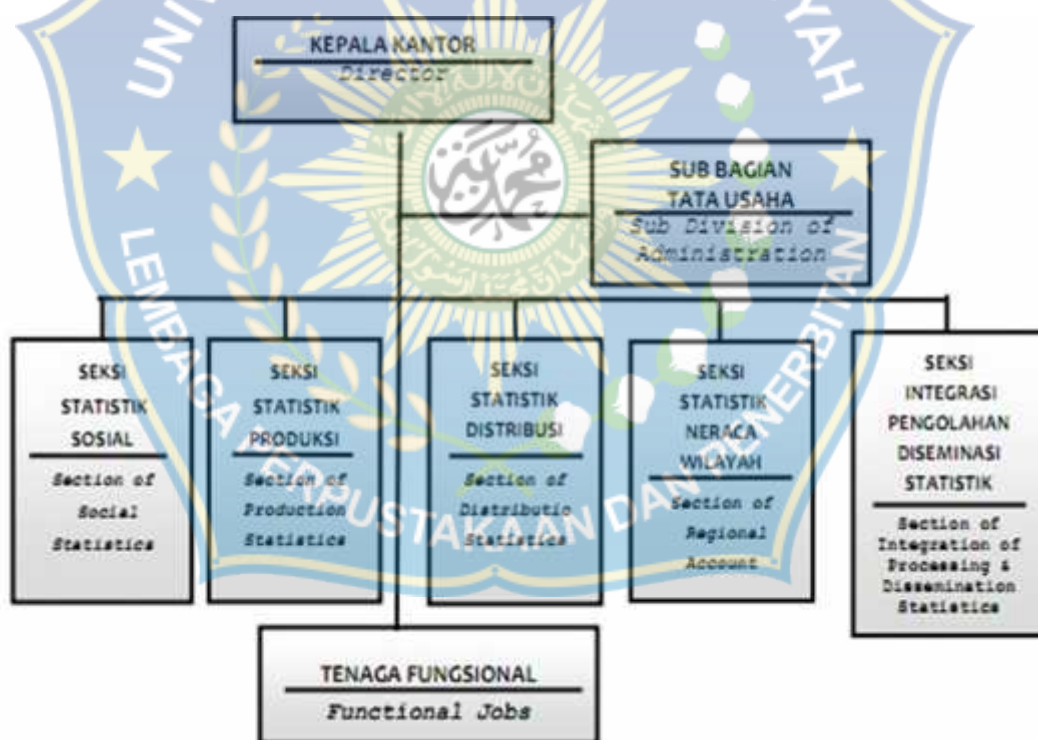
c. Kewenangan

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
4. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
5. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu;
6. i. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik;
- ii. Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

d. Visi dan Misi Badan Pusat Statistik antara lain:

1. Visi
Pelopor data statistik terpercaya untuk semua
2. Misi
 - a) Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien.
 - b) Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia.

- c) Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik.
 - d) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak.
 - e) Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.
- e. Struktur organisasi BPS Kab.Gowa



Gambar 4.2 struktur organisasi Badan Pusat Statistik

Susunan Organisasi BPS Kabupaten Gowa terdiri dari:

1. Kepala Memimpin BPS Kabupaten Gowa dengan tugas dan fungsi BPS Kabupaten serta membina arapatur BPS Kabupaten Gowa agar berdaya guna dan berhasil guna.
2. Subbagian Tata Usaha Melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian dan hukum, keuangan, perlengkapan serta urusan dalam.
3. Seksi Statistik Sosial Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan statistik sosial.
4. Seksi Statistik Produksi Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan statistik produksi.
5. Seksi Statistik Distribusi Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan statistik distribusi.
6. Seksi Neraca dan Analisis Statistik Melakukan pengumpulan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan neraca wilayah dan analisis statistik lintas sektor.
7. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Melakukan pengintegrasian pengolahan data, pengelolaan jaringan dan rujukan statistik, serta diseminasi dan layanan statistik.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

1. Data penelitian

a. Anggaran Pendapatan atau Penerimaan daerah

Adapun data penerimaan daerah tahun 2013 - 2017 yang disajikan/diuraikan dalam setiap tahun mulai 2013 sampai 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013

No	Uraian	Realisasi (Dalam 000 Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	109.776.256
	a. Hasil Pajak Daerah	35.655.815
	b. Hasil Retribusi Daerah	31.223.000
	c. Pengelolaan Kekayaan Daerah	2.004.100
	d. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	9.816.228
2	Dana Perimbangan	768.810.945
	a. Bagi hasil pajak	40.120.533
	b. Dana Alokasi Umum	586.415.307
	c. Dana Alokasi Khusus	54.785.160
3	Lain-lain Pendapatan Sah	206.894.692
	a. bagi hasil pajak dari provinsi	44.546.365
	b. penyesuaian dan otonomi daerah	127.276.156
	c. bantuan keuangan dari provinsi	35.072171
	Jumlah	1.085.461.894

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan sebagai berikut, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah tahun 2013 sebesar Rp. 35.655.815, hasil retribusi daerah tahun 2013 sebesar Rp. 31.223.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 2.004.196 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 9.816.228. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013 sebesar Rp. 109.776.256.

Realisasi dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak sebesar Rp. 40.120.533, dana alokasi umum sebesar Rp. 586.415.307 dan dana alokasi khusus sebesar Rp. 54.765.160. Dana perimbangan pada tahun 2013 sebesar Rp. 768.810.945.

Realisasi lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp. 44.546.365 dan dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp. 127.276.156 kemudian bantuan keuangan dari provinsi sebesar 35.072.171, lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2013 sebesar Rp. 206.894.692. Jadi jumlah Penerimaan Daerah pada tahun 2013 Sebesar Rp. 1.085.461.894.

Tabel 4.2

Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014

No	Uraian	Realisasi (Dalam 000 Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	149.352.694
	a. Hasil Pajak Daerah	63.143.326
	b. Hasil Retribusi Daerah	53.159.807
	c. Pengelolaan Kekayaan Daerah	2.444.802
	d. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	30.604.759
2	Dana Perimbangan	849.321.528
	a. Bagi hasil pajak	19.393.906
	b. Dana Alokasi Umum	746.700.092
	c. Dana Alokasi Khusus	80.227.530
3	Lain-lain Pendapatan Sah	241.886.024
	a. bagi hasil pajak dari provinsi	68.488.980
	b. penyesuaian dan otonomi daerah	148.693.373
	c. bantuan keuangan dari provinsi	32.703.672
	Jumlah	1.240.560.247

Sumber : Badan Pegelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dijelaskan sebagai berikut, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah sebesar Rp. 63.143.326. hasil retribusi daerah sebesar Rp. 53.159.807, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 2.444.802 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.30.604.759. PAD pada tahun 2014 sebesar Rp. 149.352.694.

Realisasi dana perimbangan yang terdiri bagi hasil pajak sebesar Rp.19.393.906, dana alokasi umum sebesar Rp.746.700.002 dan dana alokasi khusus sebesar Rp. 80.22.530. Dana perimbangan pada tahun 2014 sebesar Rp. 849.321.528.

Realisasi lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp 68.488.980, dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp. 148.693.373, kemudian Realisasi bantuan keuangan dari provinsi sebesar Rp. 32.703.672. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2014 sebesar Rp. 241.886.024. Jadi, jumlah penerimaan daerah pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.240.560.247

Tabel 4.3

Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2015

No	Uraian	Realisasi (Dalam 000 Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) a. Hasil Pajak Daerah b. Hasil Retribusi Daerah c. Pengelolaan Kekayaan Daerah d. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	154.772.383 72.080.464 45.700.441 2.507.985 34.483.493
2	Dana Perimbangan a. Bagi hasil pajak b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus	951.955.863 17.917.485 795.087.108 138.951.270

3	Lain-lain Pendapatan Sah	341.755.023
	a. bagi hasil pajak dari provinsi	62.001.609
	b. penyesuaian dan otonomi daerah	247.596.081
	c. bantuan keuangan dari provinsi	32.157.333
Jumlah		1.448.483.269

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dijelaskan sebagai berikut, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah sebesar Rp. 72.080.464, hasil retribusi daerah sebesar Rp. 45.700.441, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 2.507.985 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.34.483.493. PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada tahun 2015 sebesar Rp. 154.772.383.

Realisasi dana perimbangan yang terdiri bagi hasil pajak sebesar Rp.17.917.485, dana alokasi umum sebesar Rp.795.087.108 dan dana alokasi khusus sebesar Rp. 138.951.270. Dana perimbangan pada tahun 2015 sebesar Rp. 951.955.863.

Realisasi lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp. 62.001.609, dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp. 247.596.081, kemudian bantuan keuangan dari provinsi sebesar Rp. 32.157.333. lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2015 sebesar Rp. 341.755.023. Jadi, jumlah penerimaan daerah pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.448.483.269.

Tabel 4.4

Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016

No	Uraian	Realisasi (Dalam 000 Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) a. Hasil Pajak Daerah b. Hasil Retribusi Daerah c. Hasil Perusahaan Milik Daerah d. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	187.661.040 78.471.938.351 68.328.084.527 4.386.251.872 36.494.765.289
2	Dana Perimbangan a. Bagi hasil pajak b. Bagi hasil bukan pajak c. Dana Alokasi Umum d. Dana Alokasi Khusus	1.225.854.162.037 20.031.488.691 7.437.536.936 850.677.296.000 347.707.840.410
3	Lain-lain Pendapatan Sah a. bagi hasil pajak dari provinsi b. penyesuaian dan otonomi daerah c. bantuan keuangan dari provinsi	196.886.013881 86.997.649.524 83.741.410.000 26.146.954.357
	Jumlah	1.610.421.215.958

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dijelaskan sebagai berikut, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah sebesar Rp.78.471.938.351, hasil retribusi daerah sebesar Rp. 65.328.084.527, hasil perusahaan milik daerah sebesar Rp. 4.386.251.872 dan lain-lain

pendapatan yang sah sebesar Rp.36.494.765.289. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016 sebesar Rp. 187.681.040.

Realisasi dana perimbangan yang terdiri bagi hasil pajak sebesar Rp. 20.031.488.691, bagi hasil bukan pajak sebesar Rp. 7.437.536.936 dana alokasi umum sebesar Rp. 850.677.296.000 dan dana alokasi khusus sebesar Rp. 347.707.840.410. Dana perimbangan pada tahun 2016 sebesar Rp. 125.854.162.037

Realisasi lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp 86.997.649.524, dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp. 83.741.410.000, kemudian bantuan keuangan dari provinsi sebesar Rp. 26.146.954.357. lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2016 sebesar Rp. 196.886.013.881. Jadi, jumlah penerimaan daerah pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.610.421.215.958.

Tabel 4.5

Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017

No	Uraian	Realisasi (Dalam 000 Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	268.339.203
	a. Hasil Pajak Daerah	89.747.690
	b. Hasil Retribusi Daerah	55.937.919
	c. Hasil Perusahaan Milik Daerah	4.625.881
	d. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	118.027.711

2	Dana Perimbangan	1.304.093.896
	a. Bagi hasil pajak	22.863.412
	b. Dana Alokasi Umum	835.733.631
	c. Dana Alokasi Khusus	445.496.853
3	Lain-lain Pendapatan Sah	217.830.399
	a. Pendapatan Hibah	21.420.810
	b. bagi hasil pajak dari provinsi	87.871.879
	c. penyesuaian dan otonomi daerah	99.632.871
	d. bantuan keuangan dari provinsi	8.904.837
	Jumlah	1.790.263.499

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Gowa.

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dijelaskan sebagai berikut, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah sebesar Rp. 89.747.690, hasil retribusi daerah sebesar Rp. 55.937.919, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 4.625.881 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 118.027.711. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016 sebesar Rp. 268.339.203.

Realisasi dana perimbangan yang terdiri bagi hasil pajak sebesar Rp. 22.863.412, dana alokasi umum sebesar Rp. 835.733.631 dan dana alokasi khusus sebesar Rp. 445.496.853. Dana perimbangan pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.304.093.896.

Realisasi lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah sebesar Rp. 21.420.810, dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp 87.871.879, dana penyesuaian dan otonomi khusus

sebesar Rp. 99.632.871, kemudian bantuan keuangan dari provinsi sebesar Rp. 8.904.837. lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2016 sebesar Rp. 217.830.399. Jadi, jumlah Penerimaan Daerah pada Tahun 2016 sebesar Rp. 1.790.263.499

b. Pengeluaran atau Belanja Daerah.

Adapun data pengeluaran daerah tahun 2013 - 2017 yang disajikan/diuraikan dalam setiap tahun mulai 2013 sampai 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Realisasi Belanja Daerah Kab.Gowa Tahun 2013

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	606.370.025
	a. Belanja Pegawai	579.880.209
	b. Belanja Hibah	1.004.085
	c. Belanja Bantuan Sosial	1.022.691
	d. Belanja Hasil	24.463.039
	e. Belanja Bantuan Keuangan	23.654.312
2	Belanja Langsung	450.650.998
	a. Belanja Pegawai	25.339.237
	b. Belanja Barang dan Jasa	179.179.428
	c. Belanja Modal	302.250.470
Total		1.057.021.023

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dijelaskan sebagai berikut, Realisasi Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.

579.880.209, belanja hibah sebesar Rp. 1.004.085, belanja bantuan sosial sebesar Rp. 1.022.691, belanja hasil sebesar Rp. 24.463.039 dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 23.654.312. Jadi Belanja tidak langsung pada tahun 2013 sebesar Rp. 606.370.025. Adapun Realisasi Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 25.339.237, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 179.179.428 dan belanja modal sebesar Rp. 302.250.470. Jadi Belanja Langsung pada tahun 2013 sebesar Rp. 450.650.998. Jadi Total Belanja daerah pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.057.021.023.

Tabel 4.7

Realisasi Belanja Daerah Kab.Gowa Tahun 2014

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	694.852.204
	a. Belanja Pegawai	648.253.191
	b. Belanja Hibah	21.919.419
	c. Belanja Bantuan Sosial	2.441.754
	d. Belanja Hasil	2.320.868
	e. Belanja Bantuan Keuangan	19.916.971
2	Belanja Langsung	601.022.974
	a. Belanja Pegawai	20.143.857
	b. Belanja Barang dan Jasa	201.192.804
	c. Belanja Modal	379.663.313
	Total	1.295.875.178

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dijelaskan sebagai berikut, Realisasi Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 648.253.191, belanja hibah sebesar Rp. 21.919.419, belanja bantuan sosial sebesar Rp. 2.441.754, belanja hasil sebesar Rp. 2.320.868 dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 19.916.971. Jadi Belanja tidak langsung pada tahun 2014 sebesar Rp. 694.852.204. Adapun Realisasi Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 20.143.857, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 201.192.804 dan belanja modal sebesar Rp. 379.663.313. Jadi Belanja Langsung pada tahun 2014 sebesar Rp. 601.022.974. Jadi Total Belanja daerah pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.295.875.178.

Tabel 4.8

Realisasi Belanja Daerah Kab.Gowa Tahun 2015

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	713.702.229
	a. Belanja Pegawai	666.153.127
	b. Belanja Hibah	21.969.509
	c. Belanja Bantuan Sosial	2.445.957
	d. Belanja Hasil	3.216.665
	e. Belanja Bantuan Keuangan	19.916.971

2	Belanja Langsung	621.027.104
	a. Belanja Pegawai	40.180.987
	b. Belanja Barang dan Jasa	201.182.804
	c. Belanja Modal	379.663.313
	Total	1.334.729.333

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dijelaskan sebagai berikut, Realisasi Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 666.153.127, belanja hibah sebesar Rp. 21.969.509, belanja bantuan sosial sebesar Rp. 2.445.957, belanja hasil sebesar Rp. 3.216.665 dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 19.916.971. Jadi Belanja Tidak Langsung pada Tahun 2015 sebesar Rp. 713.702.229. Adapun Realisasi Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 40.180.987, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 201.182.804 dan belanja modal sebesar Rp. 379.663.313. Jadi Belanja Langsung pada Tahun 2015 sebesar Rp. 621.027.104. Jadi Total Belanja Daerah pada Tahun 2015 sebesar Rp. 1.334.729.333.

Tabel 4.9

Realisasi Belanja Daerah Kab.Gowa Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	983.217.798
	a. Belanja Pegawai	786.007.489
	b. Belanja Hibah	9.981.178
	c. Belanja Bantuan Sosial	17.179.453

	d. Belanja Hasil	1.675.443
	e. Belanja Bantuan Keuangan	168.374.233
2	Belanja Langsung	619.328.960
	a. Belanja Barang dan Jasa	276.853.113
	b. Belanja Modal	342.475.846
	Total	1.602.546.758

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dijelaskan sebagai berikut, Realisasi Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 786.007.489, belanja hibah sebesar Rp. 9.981.178, belanja bantuan sosial sebesar Rp. 17.179.453, belanja hasil sebesar Rp. 1.675.443 dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp.168.374.233. Jadi Belanja tidak langsung pada tahun 2016 sebesar Rp. 983.217.798. Adapun Realisasi Belanja langsung terdiri dari belanja barang dan jasa sebesar Rp. 276.853.113 dan belanja modal sebesar Rp. 342.475.846. Jadi Belanja Langsung pada tahun 2016 sebesar Rp. 619.328.960. Jadi Total Belanja daerah pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.602.546.758.

Tabel 4.10

Realisasi Belanja Daerah Kab.Gowa Tahun 2017

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	854.553.516
	a. Belanja Pegawai	656.658.328
	b. Belanja Hibah	8.928.751
	c. Belanja Bantuan Sosial	482.500

	d. Belanja Hasil	1.675.443
	e. Belanja Bantuan Keuangan	186.808.493
2	Belanja Langsung	873.409.009
	a. Belanja Pegawai	41.552.451
	b. Belanja Barang dan Jasa	353.962.254
	c. Belanja Modal	477.894.304
	Total	1.727.962.526

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dijelaskan sebagai berikut, Realisasi Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 656.658.328, belanja hibah sebesar Rp.8.928.751, belanja bantuan sosial sebesar Rp. 482.500, belanja hasil sebesar Rp. 1.675.443 dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp.186.808.493. Jadi Belanja tidak langsung pada tahun 2017 sebesar Rp. 854.553.516. Adapun Realisasi Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 41.552.451, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 353.962.254 dan belanja modal sebesar Rp. 477.894.304. Jadi Belanja Langsung pada tahun 2017 sebesar Rp. 873.409.009. Jadi Total Belanja daerah pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.727.962.526.

c. Gambaran Perekonomian kabupaten gowa

1. Pertumbuhan ekonomi

Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengamati hasil pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju

pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Tabel 4.11

PDRB Kabupaten Gowa Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan

Tahun 2013-2017

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2013	9.070.002,2	9,42
2014	9.720.169,6	7,17
2015	10.380.218,7	6,79
2016	11.169.730,1	7,61
2017	11.977.299,6	7,23

Sumber : Kabupaten Gowa dalam Angka 2018

Berdasarkan Tabel 4.11 Secara umum, PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2017, PDRB atas dasar harga konstan sebesar 11,97 triliun rupiah. Namun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa berfluktuasi dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 sebesar 9,42 persen, tetapi pada tahun 2014 dan 2015 pertumbuhan ekonomi turun menjadi 7,17 persen dan 6,79 persen. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi kembali menguat menjadi sebesar 7,63 persen. Namun pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi menurun kembali menjadi 7,23 persen.

2. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2013-2017) struktur perekonomian Gowa didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha yaitu: pertambangan dan penggalian; jasa lainnya; penyediaan akomodasi makan dan minum. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Gowa.

Tabel 4.12

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2013-2017 Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.20	6.85	3.72	5.44	4.48
B	Pertambangan dan Penggalian	9.73	12.68	12.36	13.55	13.40
C	Industri Pengolahan	7.62	5.66	6.64	8.13	8.61
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.75	19.97	-1.00	14.12	6.87
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	5.49	1.67	0.27	4.35	6.77
F	Konstruksi	28.29	4.78	7.31	7.89	8.34
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.53	10.14	6.37	10.50	9.40
H	Transportasi dan Pergudangan	8.34	9.16	6.97	3.27	6.71

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minuman	8.82	9.22	6.44	7.88	10.04
J	Informasi dan Komunikasi	16.88	5.27	10.35	10.27	9.87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.72	6.03	7.83	14.29	1.63
L	Real Estat	17.23	16.09	15.60	9.05	7.43
M,N	Jasa Perusahaan	9.87	6.11	5.29	7.35	8.20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.17	2.67	3.64	2.23	4.64
P	Jasa Pendidikan	7.78	2.51	6.76	6.12	8.61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.26	9.18	9.63	6.91	7.01
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.28	6.50	7.72	7.28	11.25
Produk Domestik Regional Bruto		9.42	7.17	6.79	7.61	7.23

Sumber : Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gowa Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

Berdasarkan tabel 4.12. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 13,40 persen. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan permintaan karena banyak pekerjaan konstruksi seperti rel kereta api di kabupaten baru dan pembangunan center point of Indonesia (CPI) di Makassar. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Sebagian besar mengalami pertumbuhan sebesar lima hingga sebelas persen. Hanya 3 lapangan usaha tumbuh dibawah 5 persen yaitu pertanian, kehutanan dan pertanian, Administrasi Pemerintahan serta jasa keuangan dan asuransi.

Lapangan usaha lainnya yang mengalami perumbuhan positif sebesar lima hingga sebelas persen tersebut yaitu lapangan usaha jasa lainnya sebesar 11,25 persen, penyediaan akomodasi dan

makan minum 10,04 persen, informasi dan komunikasi 9,87 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor sebesar 9,40 persen. Selain itu, lapangan usaha industry pengolahan juga tumbuh positif sebesar 8,6 persen, jasa pendidikan 8,61 persen, konstruksi 8,34 serta jasa perusahaan sebesar 8,2 persen. pertumbuhan lapangan usaha real estate sebesar 7,43 persen cukup besar, meskipun menurun dibandingkan tahun 2016.

Pertumbuhan terendah dialami oleh lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi yaitu hanya 1,63 persen.

C. Hasil Pengolahan Data

1. Analisis Regresi Berganda merupakan alat untuk meramalkan nilai perubah variabel bebas terhadap variabel terikat. Model pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini, berikut hasil pengolahan data analisis regresi berganda:

Tabel 4.13

Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	45365019.253	2167303.885		20.932	.002
Penerimaan Daerah	.032	.006	.785	4.944	.039
Pengeluaran Daerah	.009	.007	.218	1.375	.303

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Output SPSS versi 22, data diolah

Berdasarkan pada tabel 4.13 (*coefficients*) dapat diketahui nilai koefisien penerimaan daerah (X1) sebesar 0,032, pengeluaran daerah (X2) sebesar 0,009 dengan nilai konstanta sebesar 45365019.253. Dengan demikian terbentuk persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 45365019,253 + 0,032 X_1 + 0,0 X_2$$

Persamaan regresi linear berganda tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 45365019,253 yang berarti bahwa jika variabel jumlah penerimaan daerah dan pengeluaran daerah sama dengan nol maka besarnya Pertumbuhan ekonomi adalah 45365019,253. Variabel tingkat penerimaan daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa. Selain itu, pada nilai koefisien penerimaan daerah sebesar 0,032 maka hubungannya jika terjadi perubahan penerimaan daerah sebesar satu persen maka akan mengubah pertumbuhan ekonomi sebesar 0,032 persen. Selain itu untuk variabel pengeluaran daerah di Kabupaten Gowa memiliki hubungan positif dan tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$ sehingga tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa.

2. Koefisien Korelasi

Adapun hasil koefiesn korelasi dapat dilihat pada tabel 4.14 sebagai berikut:

Tabel 4.14

Output Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.999 ^a	.998	.995	806169.33700	.998	406.033	2

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Daerah, Penerimaan Daerah

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Output SPSS versi 22, data diolah

Hasil koefisien korelasi menunjukkan bahwa $R = 0,999$ artinya mengidentifikasi bahwa hubungan variabel X1 (Penerimaan Daerah) Dan X2 (Pengeluaran Daerah) terhadap Y (Pertumbuhan Ekonomi) adalah sangat kuat.

3. Koefisien Determinan (R Square)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Nilai koefisien detreminasi menunjukkan besarnya variasi yang dapat dijeaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. Untuk mengetahui besarnya pengaruh antar variabel X1 dan X2 terhadap Y yang dikuadratkan (*R square*).

Berdasarkan tabel 4.14, besarnya R^2 (*R square*) yang diperoleh dari pengolahan data dengan menggunakan SPSS sebesar 0,998. Dengan demikian besarnya pengaruh antar variabel bebas dan variabel

terikat adalah sebesar 99,8%. Sedangkan sisanya sebesar 0,2 atau 2% dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4. Uji Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) yang meliputi X1 (Penerimaan daerah), dan X2 (Pengeluaran daerah), secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Pada tabel 4.15 menunjukkan hasil dari regresi secara simultan sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil uji simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5277693594852 80.800	2	2638846797426 40.400	406.033	.002 ^b
	Residual	1299817999844. 350		649908999922.1 75		
	Total	5290691774851 25.200	4			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

b. Predictors: (Constant), Pengeluaran Daerah, Penerimaan Daerah

Sumber : Output SPSS versi 22, data diolah

Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,002 < 0,5 dan nilai F hitung 406,033 > F tabel 19,00, (mencari nilai F tabel

ditentukan oleh numerator $(k-1)$ ($3-1=2$) dan df untuk denominator $(n-k)$ ($5-3=2$) dengan melihat f tabel) sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independent (X_1 dan X_2) berpengaruh terhadap variabel dependent (Y).

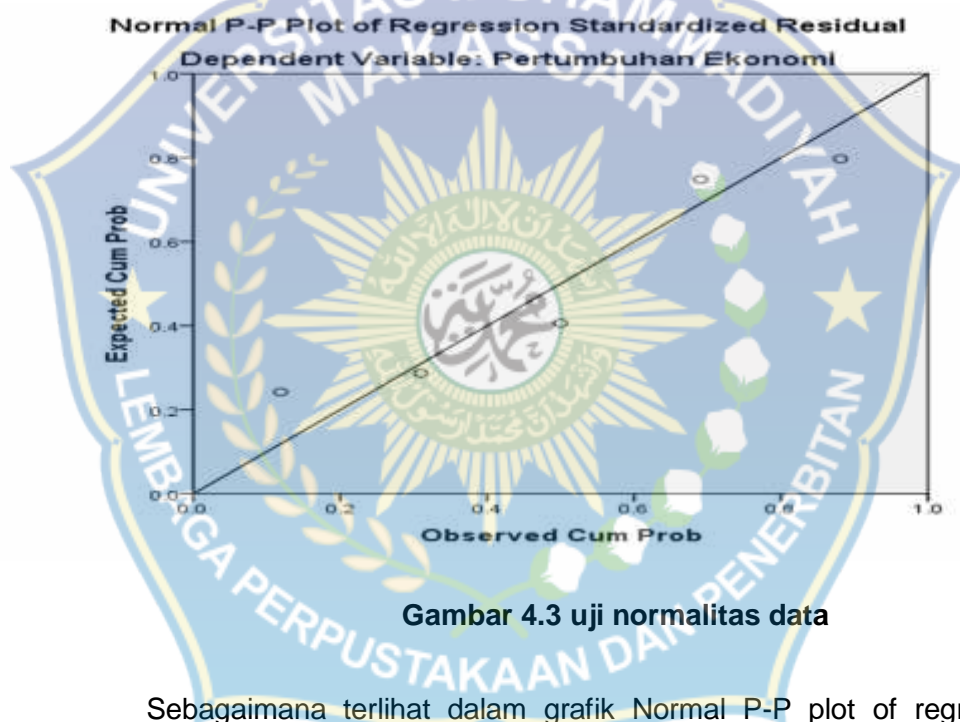
5. Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t digunakan untuk menunjukan apakah masing-masing variabel independen yaitu penerimaan daerah dan pengeluaran daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi (Y). tabel 4.13 menunjukkan hasil analisis koefisien regresi:

- a. Diketahui nilai sig. untuk pengaruh X_1 terhadap Y adalah sebesar $0,039 < 0,05$ dan nilai t hitung $4,944 > t$ tabel $4,302$ (mencari nilai t tabel dengan rumus $df = n-k$ ($df = 5-3=2$) dan taraf sig. 5% karena dua sisinya, jadi signifikansinya $0,025$ dengan melihat t tabel) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti terdapat pengaruh X_1 terhadap Y . Penerimaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- b. Diketahui nilai sig. untuk pengaruh X_2 terhadap Y adalah sebesar $0,303 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,375 < t$ tabel $4,302$ (mencari nilai t tabel dengan rumus $df = n-k$ ($df = 5-3=2$) dan taraf sig. 5% karena dua sisinya, jadi signifikansinya $0,025$ dengan melihat t tabel) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X_2 terhadap Y . Pengeluaran daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

6. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, digunakan uji *Kolmogorov-Smimov*. Pengujian dilakukan dengan bantuan program SPSS. Uji normalitas dilakukan terhadap seluruh variabel penelitian, yang berarti ada 3 hasil uji normalitas, yaitu variabel pertumbuhan ekonomi (Y), penerimaan daerah (X1), Pengeluaran daerah (X2). Berikut adalah output analisisnya.



Gambar 4.3 uji normalitas data

Sebagaimana terlihat dalam grafik Normal P-P plot of regression Standardized Residual, terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal (membentuk garis lurus), maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal dan model regresi layak dipakai untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi berdasarkan variabel bebasnya.

7. Uji heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika varians berbeda, disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas. Hasil pengujian ditunjukkan dalam tabel berikut :



Gambar 4.4 uji heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik Scatterplot tersebut, terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi berdasarkan masukan variabel

independent-nya.

D. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)

Pengaruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa Tahun 2013-2017, sebagai berikut :

1. Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa.

Hipotesis untuk menguji penerimaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

Pernyataan Hipotesis :

Ho : $\beta_1 > 0$: Penerimaan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Ha : $\beta_1 < 0$: Penerimaan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Kriteria pengujian dua pihak

Jika : $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka Ha diterima dan Ho ditolak

$t_{hitung} < t_{tabel}$ maka Ha ditolak dan Ho diterima

Dari hasil analisis regresi secara parsial pada tabel 4.13 dimana koefisien diperoleh nilai t-hitung untuk variabel bebas (X1) sebesar 4,944 dan nilai t-tabel sebesar 4,302.

Oleh karena itu untuk koefisien variabel penerimaan daerah (X1) sebesar t-hitung 4,944 > t-tabel 4,302 dengan tingkat signifikan sebesar 0,039 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 atau 5%. Maka Ha diterima dan Ho ditolak yang berarti terdapat pengaruh antara penerimaan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa dan nilai koefisien

dan t-hitung positif sehingga penerimaan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan daerah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daud wido (2017), Dy ilham (2017) dan Andri devita (2014), dimana ditemukan bahwa penerimaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penerimaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa berdasarkan peningkatan penerimaan daerah setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan daerah tersebut sebagian besar bersumber dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa Terutama lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang menyumbang sebesar 13,40 persen Salah satu penyebabnya adalah kenaikan permintaan karena banyak pekerjaan konstruksi seperti rel kereta api di Kabupaten Barru dan pembangunan center point of Indonesia (CPI) di Makassar dan Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif sebagian besar mengalami pertumbuhan sebesar lima hingga sebelas persen Hanya 3 lapangan usaha tumbuh dibawah 5 persen yaitu pertanian, kehutanan dan pertanian, Administrasi Pemerintahan serta jasa keuangan dan asuransi walaupun pertumbuhan ekonomi tidak mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi terdapat faktor lainnya yang menambah penerimaan daerah kabupaten gowa seperti dana perimbangan yang bersumber dari APBN dan lain-lain pendapatan yang

sah yang mendorong peningkatan penerimaan daerah di Kabupaten Gowa Setiap tahunnya

2. Pengaruh Pengeluaran Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Gowa.

Hipotesis untuk menguji pengeluaran daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

Pernyataan Hipotesis :

Ho : $\beta_1 > 0$: Pengeluaran daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Ha : $\beta_1 < 0$: Pengeluaran daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Kriteria pengujian dua pihak

Jika : $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka Ha diterima dan Ho ditolak

$t_{hitung} < t_{tabel}$ maka Ha ditolak dan Ho diterima

Dari hasil analisis regresi secara parsial pada tabel 4.13 dimana koefisien diperoleh nilai t-hitung untuk variabel bebas (X₂) sebesar 1,375 dan nilai t-tabel sebesar 4,302.

Oleh karena itu untuk koefisien variabel pengeluaran daerah (X₂) sebesar t-hitung 1,375 > t-tabel 4,302 dengan tingkat signifikan sebesar 0,303 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 atau 5%. Maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh antara pengeluaran daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa dan nilai koefisien dan t-hitung positif.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengeluaran daerah (X₂) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

(Y) di Kabupaten Gowa. Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Gusti (2014), Reza (2013) dan Andri Devita (2014), dimana ditemukan bahwa pengeluaran daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan tingkat pengeluaran daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung yang tiap tahun mengalami peningkatan dengan demikian, peningkatan yang terjadi itu tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan analisis data time series dengan menggunakan data yang terbatas hanya 5 tahun (2013-2017) dengan menggunakan analisis regresi berganda, maka besar kemungkinan hasil regresinya tidak maksimal sehingga pengeluaran daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa. Peran Pemerintah sangat diperlukan dalam mengatur ekonomi. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur perekonomian adalah dengan menerapkan kebijakan fiskal dengan mengalokasikan pengeluaran pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Pengeluaran daerah merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Tingkat efektifitas pengeluaran daerah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Hal ini disebabkan karena pengeluaran daerah lebih berkaitan erat dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dimana secara langsung akan mempengaruhi penerimaan daerah dan pembiayaan-pembiayaan daerah, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh APBD terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa dapat diambil kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil analisis penerimaan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa periode 2013-2017 menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $4,944 > 4,302$ dengan nilai probabilitas $0,039$ di bawah $0,05$ atau 5% artinya variabel penerimaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa
2. Berdasarkan hasil analisis pengeluaran daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa periode 2013-2017 menunjukkan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu $1,375 < 4,302$ dengan nilai probabilitas $0,303 > 0,05$ atau 5% artinya variabel pengeluaran daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Gowa diharapkan dapat menggali lagi potensi-potensi Pendapatan Asli Daerahnya sendiri salah satu alternatif sumber penerimaan utama sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah tanpa terlalu bergantung banyak dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Gowa harus lebih bijaksana dalam penyusunan pengeluaran daerah di karenakan tiap tahunnya mengalami peningkatan

yang cukup besar dalam penggunaannya harus memperhatikan penghematan dan efisiensi guna menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan Kabupaten Gowa.

2. Bagi masyarakat, khususnya petani agar bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam membuat kebijakan-kebijakan dan menyusun strategi agar meningkatkan sektor pertanian yang kontribusinya cukup besar tetapi dari tahun ketahun mengalami penurunan. Selain itu, pemerintah juga harus membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong peningkatan sektor-sektor lainnya maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa.
3. Diharapkan bagi Peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan melibatkan variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini sehingga dapat memperkaya khasanah ilmu dan pengetahuan terutama dalam kajian ilmu ekonomi dan menambah tahun pengamatan tidak hanya 5 tahun agar dapat memberikan gambaran hasil penelitian yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa
- Badan Pusat Statistik *Indikator Ekonomi* Kabupaten Gowa Tahun 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa dalam Angka 2018
- Devita, Andri. 2014. Pengaruh PAD, DAU dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kab/Kota di provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif dan Pembangunan Daerah*. Vol. 2 No. 2 Oktober-Desember.
- Monanda, Reza. 2013. "*Pengaruh APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Dairi*" Skripsi. Medan : Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Munandar, Dy Ilham S. 2017. Model Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus dalam APBD Kab/kota di provinsi Aceh. *Jurnal Visioner dan Strategis*. Vol. 6 No. 2 September.
- Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*
- Wahyuni, I Gusti A.Y. 2011. Pengaruh Pengeluaran Pemerinah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kab/Kota di provinsi Bali. Universitas Udayana. *E-Jurnal Ekonomi dan bisnis* Vol. 3.No. 8.
- Wido, Daud. 2017. "*Analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/provinsi diprovinsi lampung tahun 2011-2015*" Skripsi. Lampung: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
- Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1. Hasil Pengolahan Data

REGRESSION

```

/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X1 X2
/SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED)
/RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID)
/CASEWISE PLOT(ZRESID) ALL.

```

Regression

Output Created		14-JUN-2019 18:46:57
Comments		
Input	Data	C:\Users\ASUS X200\Documents\Untitled1.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data	
	File	5
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.

Syntax	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
		<pre> REGRESSION /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Y /METHOD=ENTER X1 X2 /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,ZPRED) /RESIDUALS DURBIN HISTO- GRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) /CASEWISE PLOT(ZRESID) ALL. </pre>
Resources	Processor Time	00:00:01.00
	Elapsed Time	00:00:01.01
	Memory Required	1644 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	904 bytes

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pertumbuhan Ekonomi	104646840.4000	11500751.90461	5
Penerimaan Daerah	1435038016.8000	281580456.25894	5
Pengeluaran Daerah	1403626963.6000	265167706.60421	5

Correlations

		Pertumbuhan Ekonomi	Penerimaan Daerah	Pengeluaran Daerah
Pearson Correlation	Pertumbuhan Ekonomi	1.000	.998	.984
	Penerimaan Daerah	.998	1.000	.975
	Pengeluaran Daerah	.984	.975	1.000
Sig. (1-tailed)	Pertumbuhan Ekonomi	.	.000	.001
	Penerimaan Daerah	.000	.	.002
	Pengeluaran Daerah	.001	.002	.
N	Pertumbuhan Ekonomi	5	5	5
	Penerimaan Daerah	5	5	5
	Pengeluaran Daerah	5	5	5

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengeluaran Daerah, Penerimaan Daerah ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.999 ^a	.998	.995	806169.33700	.998	406.033	2

Model Summary^b

Model	Change Statistics		
	df2	Sig. F Change	
1	2	.002	1.498

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Daerah, Penerimaan Daerah

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	527769359485280.800	2	263884679742640.400	406.033	.002 ^b
	Residual	1299817999844.350	2	649908999922.175		
	Total	529069177485125.200	4			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

b. Predictors: (Constant), Pengeluaran Daerah, Penerimaan Daerah

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	45365019.253	2167303.885		20.932	.002
Penerimaan Daerah	.032	.006	.785	4.944	.039
Pengeluaran Daerah	.009	.007	.218	1.375	.303

Coefficients^a

Model	Correlations			Collinearity Statistics	
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)					
Penerimaan Daerah	.998	.961	.173	.049	20.514
Pengeluaran Daerah	.984	.697	.048	.049	20.514

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Coefficient Correlations^a

Model		Pengeluaran Daerah	Penerimaan Daerah
1	Correlations	Pengeluaran Daerah	1.000
		Penerimaan Daerah	-.975
	Covariances	Pengeluaran Daerah	4.740E-5
		Penerimaan Daerah	-4.354E-5

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Penerimaan Daerah	Pengeluaran Daerah
1	1	2.980	1.000	.00	.00	.00
	2	.019	12.486	.97	.01	.01
	3	.001	64.800	.03	.99	.99

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Casewise Diagnostics^a

Case Number	Std. Residual	Pertumbuhan Ekonomi	Predicted Value	Residual
1	.668	9.07E+7	90161449.6929	538572.30713
2	-.238	9.72E+7	97393346.4642	-191650.46424
3	-.699	1.04E+8	104425810.5663	-563623.56632
4	-.563	1.12E+8	112151034.0406	-453733.04057
5	.832	1.20E+8	119102561.2360	670434.76400

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

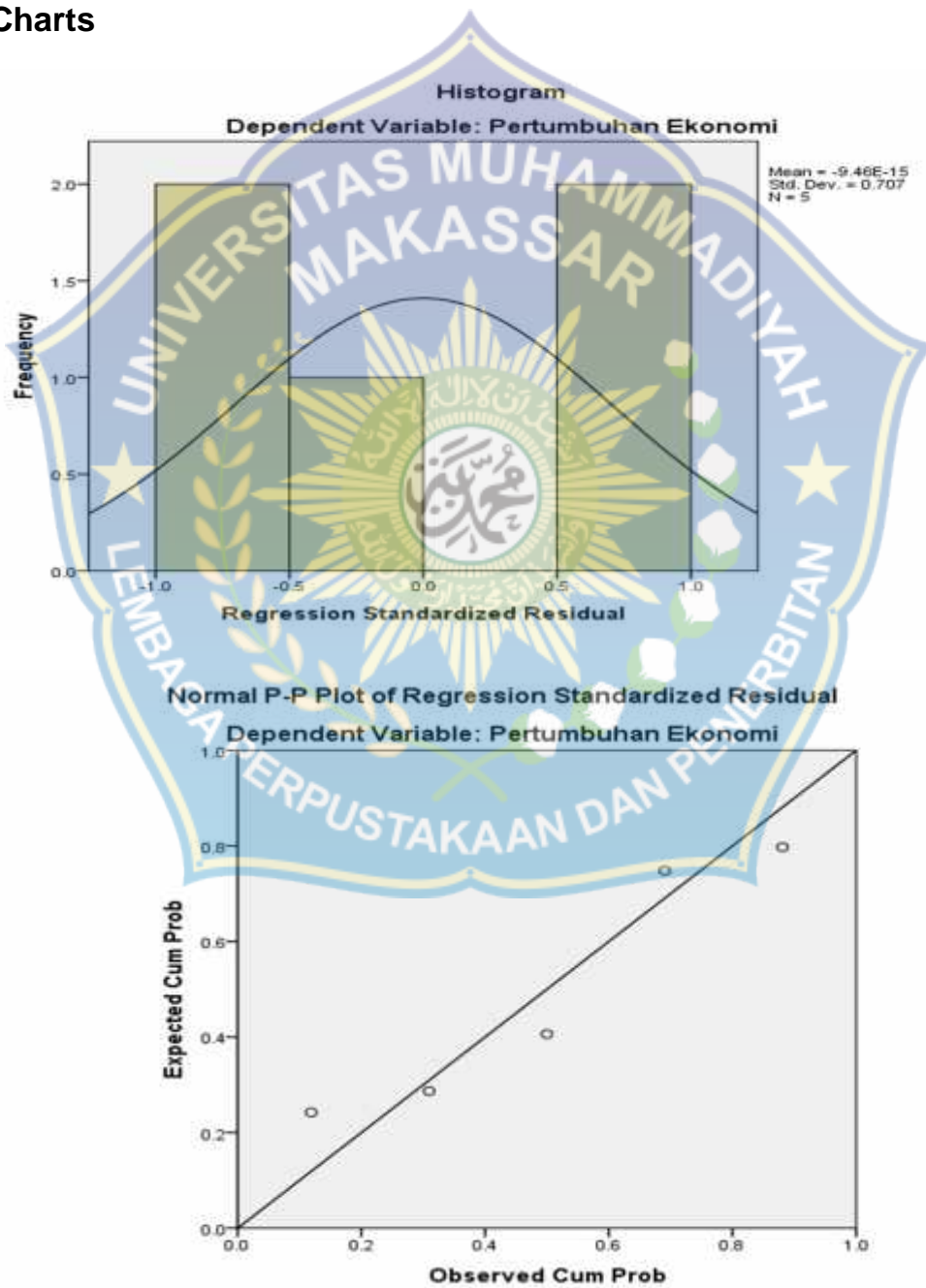
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	90161448.0000	119102560.0000	104646840.4000	11486615.68397	5
Residual	-563623.56250	670434.75000	.00000	570047.80498	5

Std. Predicted Value	-1.261	1.258	.000	1.000	5
Std. Residual	-.699	.832	.000	.707	5

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Charts





Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262

37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 16510/S.01/PTSP/2019
 Lampiran :
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 1. Bupati Gowa
 2. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Gowa

di-
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1542/05/C.4-VIII/A/1440/2019 tanggal 18 Mei 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **LINARTI RAMLI**
 Nomor Pokok : 105710228915
 Program Studi : IESP
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah Kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 25 Mei s/d 25 Juli 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 21 Mei 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
 Pangkat : Pembina Utama Madya



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 28 Mei 2019

Nomor : 070/686 /BKB.P/2019
 Lamp : -
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
 Yth. Ka. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Di-
Tempat.

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor: 16510/S.01/PTSP/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **LINARTI RAMLI**
 Tempat/Tanggal Lahir : Taipakkodong, 07 September 1997
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Pallangga

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Skripsi di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI-SELATAN**"

Selama : 25 Mei s/d 25 Juli 2019
 Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. **KEPALA BADAN
 SEKRETARIS,**

DRS. ALWI ARIFIN, M. Si

Pangkat : Pembina Tk. 1

N.I.P. : 19670808 198811 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
3. Yang Bersangkutan ;
4. Pertinggal;



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN GOWA**

Sungguminasa, 29 Mei 2019

Nomor : B-193/BPS/73060/29/05/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat
KETUA LP3M UNISMUH MAKASSAR
di-
Makassar.

Dengan hormat;

Membalas Surat Dekan Fakultas Ekonomi dengan Nomor 1542/05/C 4-VIII/V/1440/2019 tertanggal 29 Mei 2019, tentang Izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini.

Nama : Linarti Ramli
Nomor Pokok : 105710228915
Program Studi : Ilmu Ekonomi / Studi Pembangunan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar

Diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di BPS Kabupaten Gowa dalam rangka penyusunan tugas akhir berjudul

“Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan”

Demikian disampaikan, atas perhatiannya drucapkan terima kasih.

An. BPS Kabupaten Gowa
Kepala Sub-Bagian Tata Usaha


Dra. Darmawati
NIP 19611205 198202 2 001

BIOGRAFI PENULIS



Linarti ramli panggilan Narti lahir di Taipakkodong pada tanggal 07 September 1997 dari pasangan suami istri Bapak Ramli Dg.Buang dan Ibu Nurlia Dg.Cora. Peneliti adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Taipakkodong Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri Borongkaramasa lulus tahun 2009, SMP Negeri 1 Pallangga lulus tahun 2012, SMA Negeri 9 Gowa lulus tahun 2015, dan mulai tahun 2015 mengikuti program S1 Ekonomi Pembangunan Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan ini penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

